

## ABSTRAK

Untuk mengatur ketertiban dan kenyamanan di lingkungan kabupaten Wonosobo Pemerintah dan DPRD Kabupaten Wonosobo membuat Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Wonosobo. Hal ini terkait dengan maraknya tempat usaha karaoke yang ada di Wonosobo Namun setelah di sahkan peraturan tersebut menuai banyak konflik di masyarakat. Hal ini membuat penulis tertarik untuk membuat Analisis Yuridis Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Nomor. 3 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Wonosobo.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode *yuridis sosiologis*, yaitu menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah,

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 96 "Masyarakat memiliki hak untuk memberikan masukan secara lisan dan / atau tertulis yang dimaksud dapat dilakukan melalui dengar pendapat publik, kunjungan kerja, sosialisasi dan / atau, seminar, lokakarya dan / atau diskusi.

Dalam pembentukan Peraturan Daerah Nomor. 3 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Wonosob. Partisipasi publik belum maksimal. Kendala yang di hadapi adalah kurangnya animo masyarakat dalam berpartisipasi, pemerintahdi nilai kurang menampung aspirasi warga seharusnya hal itu bisa diatasi dengan, memberikan pengertian tentang pentingnya partisipasi publik, menampung semua aspirasi dari masyarakat

Kata kunci :Partisipasi Publik, Peraturan Daerah, Hiburan

## *ABSTRACT*

To regulate order and comfort in the Wonosobo regency, the Wonosobo District Government and DPRD made Regional Regulation No. 3 of 2017 concerning the Implementation of Entertainment Businesses in Wonosobo Regency. This is related to the rampant karaoke business in Wonosobo, but after the regulation was passed, it reaped a lot of conflict in the community. This makes the writer interested in making Juridical Analysis of Public Participation in the Formation of Regional Regulation Number. 3 of 2017 concerning the Implementation of Entertainment Businesses in Wonosobo Regency.

The method of approach used in this study is a sociological juridical method, which uses principles and legal principles in reviewing, seeing, and analyzing problems,

According to Law No. 12 of 2011 Establishment of Legislation Regulations. Article 96 "The community has the right to provide input verbally and / or in writing as intended by public hearings, work visits, socialization and / or, seminars, workshops and / or discussions.

In the formation of the Regional Peraturan Number. 3 of 2017 concerning the Implementation of Entertainment Businesses in Wonosobo Regency. Public participation is not maximized. The obstacle faced was the lack of public interest in participating, the government in the value of not accommodating the aspirations of the people, it should be overcome by providing an understanding of the importance of public participation, accommodating all aspirations from the community.

Keywords: Public Participation, Regional Regulations, Entertainment